

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan pemberlakuan otonomi daerah membuat setiap daerah memiliki wewenang dalam mengambil keputusan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat (Yenita dan Subardjo, 2019)

Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum (Purba dan Amrul, 2018).

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan

pengawasan yang harus dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah di periode selanjutnya (Artini dan Putra, 2020).

Penyampaian hasil laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dengan prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap (Fauziah dan Handayani, 2017).

Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimum lima kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI yang kesembilan diselenggarakan pada bulan Juni 2020. Selain Provinsi Jawa Timur, penghargaan yang sama juga diberikan kepada beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur total ada 22 kabupaten/ kota yang tercatat meraih penghargaan Opini WTP sebanyak lima kali berturut-turut. Beberapa daerah yang berhasil meraih antara lain, Sidoarjo, Probolinggo, Tuban, Bondowoso, Bojonegoro, Jombang, Gresik, Pamekasan, Malang, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Banyuwangi, Kota Malang, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Surabaya dan Kota Kediri. Selain itu, Kota Blitar juga menerima penghargaan Opini WTP sepuluh kali berturut turut oleh BPK

RI. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi penerima terbanyak peraih WTP lima tahun berturut-turut sebanyak 23 daerah (kominfo.jatimprov.go.id diakses pada 5 November 2021).

Fenomena lain yang berkaitan pada penelitian ini, ditengah Covid-19 yang sedang mewabah ini tidak menurunkan semangat pemerintah bersama masyarakat dalam melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin. Hal ini dibuktikan Pemerintah Kabupaten Pacitan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur yang ke-11 kalinya. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 diterima langsung Bupati Pacitan dan Ketua DPRD Kabupaten Pacitan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur. Opini WTP ini merupakan yang ke-11 kalinya diterima oleh Pemkab Pacitan, dan 9 kali diterima secara berturut-turut. Pertama kali Kabupaten Pacitan memperoleh opini WTP untuk pemeriksaan Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya 2011 kembali mendapatkan opini WTP. Tahun 2012 Kabupaten Pacitan mendapat opini WDP, kemudian mulai Tahun Anggaran 2013 sampai 2021 berturut-turut mendapat opini WTP (pacitanku.com diakses pada 14 Juli 2022).

Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik

penyajian laporan keuangan semakin memperjelas pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam pelaporan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Mawaddah, dkk 2019).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola dana publik. Publikasi laporan keuangan dapat disampaikan melalui media seperti surat kabar, stasiun televisi, dan internet (*website*) (Dewi dan Mildawati, 2018).

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan (Purba dan Amrul, 2018).

Dalam menentukan keandalan pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik yaitu pengendalian internal. Penerapan pengendalian intern harus dilakukan untuk mewujudkan terciptanya kinerja instansi

pemerintah yang baik, dibutuhkan pengendalian internal pemerintah agar dapat memberi keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan serta dapat tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah (Damayanti dan Hermanto, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mansyuer dan Efendi (2020) yang meneliti pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Antika, dkk (2020) yang meneliti pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian internal mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah merupakan perangkat

pemerintah daerah yang mengelola laporan keuangan dan juga menggunakan laporan keuangan. Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mansyuer & Efendi (2020) dan Antika, dkk (2020). Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Mansyuer & Efendi (2020) dan Antika, dkk (2020) yaitu terletak pada variabel independen dan wilayah obyek penelitian. Penelitian Mansyuer & Efendi (2020) menggunakan variabel independen sistem pengendalian intern pemerintah, penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan dengan wilayah obyek penelitian di OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian Antika, dkk (2020) menggunakan variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal dengan wilayah obyek di kelurahan Kota Bekasi. Maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?

3. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
4. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
5. Apakah Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Mengetahui pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Mengetahui pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan

Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan literatur dan memberikan pengembangan konseptual untuk penelitian sejenis meupun untuk akademika yang lainnya khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Pihak Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi para pegawai Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori.



